



edelweis

Jendela Informasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Edisi V: September - Oktober 2020



Kisah Sukses Pendampingan

KTH Hejo Cipruk

PERSIAPAN GEPANG MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI

EKSPEDISI
CURUG AUL

ISSN 1978-6131



9 771978 613141



Pada Edisi Kelima (September - Oktober) tahun 2020, Buletin Edelweis pada rubrik “**Mengelola Rimba**” berbagi cerita tentang “**Persiapan Gepang Menuju Wilayah Bebas Korupsi**” diungkapkan oleh Ika Rosmalasari. Dalam pengelolaan Cagar Biosfer Aganto Seno berbagi cerita dalam perjalanannya “**Cibodas Menyapa Samota**” dan untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan kawasan TNGGP tetap lestari, Poppy Oktadiyani mengungkapkan “**Rencana Pemberdayaan Masyarakat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango**”.

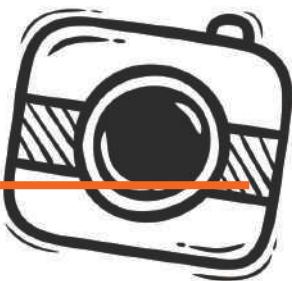
Di samping kisah dalam mengelola rimba, kita juga bisa melihat gambaran hasil mengelola rimba untuk masyarakat sekitar kawasan, seperti dapat dilihat dalam rubrik “**Suara Zona Penyangga**”. Febriyani bercerita tentang “**Kisah Sukses Pendampingan KTH Hejo Cipruk**” dan Mohamad Arif Junaedi berkisah “**Dari Petani Penggarap menjadi Pelaku Jasa Wisata**”.

Dalam rubrik “**Wisata Alam**” Agung Pakerti berbagi cerita tentang “**Ekspedisi Curug Aul, Keindahan Tersembunyi di Pedalaman Pasir Hantap**” dan “**Serpihan Pesona Alam yang Belum Tersentuh di Resort PTN Goalpara**” yang diceritakan oleh Agus Deni.

Selanjutnya dalam rubrik “**Bioprospecting**” dibunyikan oleh Ai Nani Rohaeni dalam tulisannya “**Sirip Penyu/ Ramo Kuya**”, “**Canar Bokor/ Canar Besar**” dan “**Tongkat/ Tongkat Leutik**” yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Pada rubrik “**Serba-serbi Konservasi**” Randi berbagai informasi tentang “**Dampak Pendaki Ilegal**” yang berharap agar para pendaki menjadi “**Pendaki Cerdas**” yang peduli diri, peduli kawan, dan peduli terhadap lingkungan.

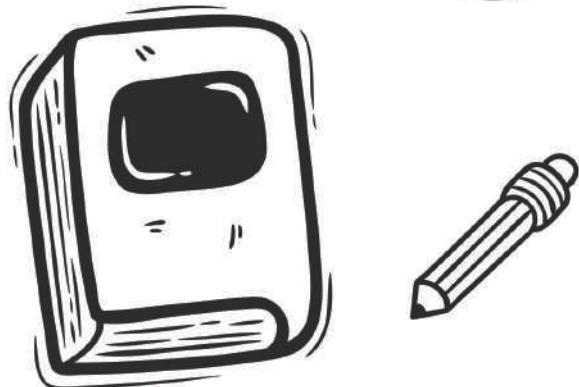
Selamat menyimak dan terima kasih.

Daftar Isi



Mengelola Rimba

- 3 PERSIAPAN GEPANG MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
- 6 CIBODAS MENYAPA SAMOTA
- 10 RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TNGGP
- 13 KISAH SUKSES PENDAMPINGAN KTH HEJO CIPRUUK

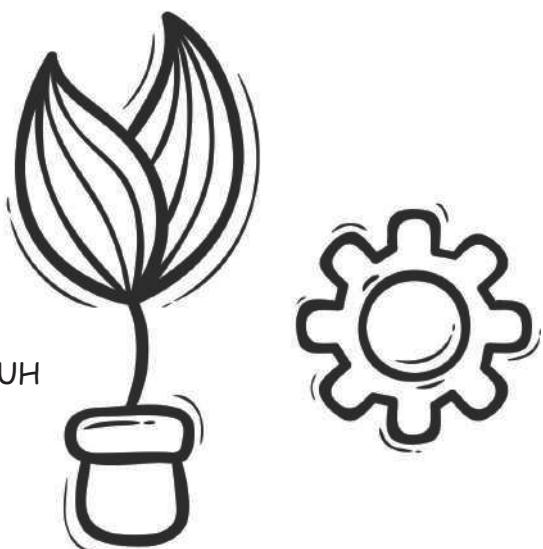


Suara Zona Penyangga

- 17 DARI PETANI PENGGARAP MENJADI PELAKU JASA WISATA

Wisata Alam

- 21 "EKSPEDISI CURUG AUL" KEINDAHAN TERSEMBOUNGI DI PEDALAMAN PASIR HANTAP
- 23 SERPIHAN PESONA ALAM YANG BELUM TERSENTUH "DI RESORT PTN GOALPARA"



Bioprospecting

- 26 SIRIP PENYU/ RAMO KUYA
- 27 CANAR BOKOR/ CANAR BESAR
- 28 TONGKAT/ TONGKAT LEUTIK



Serba-serbi Konservasi

- 29 DAMPAK PENDAKI ILEGAL

SUSUNAN REDAKTUR BULETIN EDELWEIS

Pelindung: Kepala Balai Besar TNGGP
Penanggung Jawab: Kepala Bagian Tata Usaha
Redaktur: Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan
Editor: Aden Mahyar Burhanuddin, Poppy Oktadiyani, & Agus Mulyana
Sekretaris: Randi

MENGELOLA RIMBA

ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS KORUPSI

R

at Datang

ke Kawasan

TOLAK GRATIFIKASI

N
K
KORUPSI



Taman Nasional
GUNUNG GEDE PANGRANGO

Bersama: Ika Rosmalasari

PERSIAPAN GEPANG MENUJU

WILAYAH BEBAS KORUPSI

Bersama: Ika Rosmalasari

Pencanangan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menetapkan 3 (tiga) sasaran utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik, mengharuskan seluruh organisasi pemerintah melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu upaya terobosan yang dilaksanakan untuk mengakseserai pencapaian 3 (tiga) sasaran utama pemerintah dimaksud. Bagi instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka akan dinobatkan sebagai organisasi dengan predikat zona integritas.

Tahun 2020 ini, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memulai petualangannya untuk memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK. Dengan menetapkan tim pembangunan zona integritas sejak 28 Januari 2020, Gede Pangrango berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Namun demikian, dalam perjalannya sangatlah tidak mudah, karena pada kenyataannya sangatlah tidak mudah, karena pada kenyataannya personil Gede Pangrango belum memahami reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Bagi Pimpinan Gede Pangrango, hal tersebut menjadi tantangan yang harus ditaklukan, karena kunci keberhasilan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terletak pada kualitas sumberdaya manusia, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) Gede Pangrango harus selalu berubah kearah yang lebih baik. ASN juga harus bisa menjadi katalisator perubahan, pemberi solusi, mediator dan fasilitator (penghubung).

Oleh karenanya Pimpinan Gede Pangrango melakukan berbagai upaya melalui:

1. Internalisasi reformasi birokrasi bagi seluruh pegawai.
2. Penyesuaian anggaran pendukung program pembangunan zona integritas.
3. Peningkatan pemahaman tim pembangunan zona integritas.
4. Penunjukan agen perubahan.
5. Koordinasi, konsultasi, dan pendampingan tim pembangunan zona integritas.
6. Implementasi.

Internalisasi Reformasi Birokrasi

Pada tahapan ini Pimpinan Gede Pangrango mensosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia. Hal mendasar yang perlu dilakukan perubahan yaitu membiasakan pegawai untuk mendokumentasikan bukti hasil kerja, karena suatu kinerja yang dilakukan tanpa didukung dengan dokumen kerja yang memadai, maka lembaga pengawas tidak akan bisa memberikan penilaian tentang lingkup kerja dari pegawai dan lembaga yang diawasinya.

Program internalisasi reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman setiap pegawai untuk membuat laporan kerja dengan standar yang lebih baik, penuh tanggung jawab, dan integritas tinggi.

Internalisasi kepada tim pembangunan zona integritas dilakukan dengan membagi kelompok kerja (pokja) berdasarkan kriteria dari komponen pengungkit yaitu manajemen perubahan, penataan tata-laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap pokja bertanggungjawab untuk mengawal pelaksanaan dan pendokumentasian kegiatan sebagai prasyarat dalam penilaian.

Penyesuaian Anggaran

Komitmen reformasi birokrasi yang diputuskan Pimpinan Gede Pangrango berpengaruh terhadap manajemen anggaran (*budgeting*), karena setiap

pelaksanaan program sebagai upaya menindaklanjuti komitmen, perlu didukung dengan anggaran yang memadai sehingga dapat dipastikan berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karenanya, Pimpinan Gede Pangrango mengambil langkah penyesuaian anggaran pendukung program pembangunan zona integritas, antara lain dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bahan sosialisasi, aspirasi publik serta untuk pendampingan dan peningkatan pemahaman tim melalui kegiatan organisasi pembelajar.

Peningkatan Pemahaman Tim

Agar tim pembangunan zona integritas dapat berkinerja baik, Pimpinan Gede Pangrango menugaskan anggota tim untuk mengikuti program organisasi pembelajar dengan melakukan kunjungan kerja ke instansi yang telah berhasil memperoleh predikat WBK. Kunjungan kerja dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait portofolio dan pengalaman saat dilakukan penilaian. Hasil kunjungan kerja dijadikan referensi dalam mempersiapkan dokumen bukti kerja yang menjadi unsur penilaian utama.

Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kriteria penilaian sudah dilaksanakan di Gede Pangrango, namun bukti kerjanya belum terdokumentasikan dengan baik. Hal ini yang menjadikan Gede Pangrango harus berusaha keras untuk melakukan perubahan, dengan merubah kebiasaan dan merubah pola pikir bahwa dokumentasi adalah nyawa organisasi.

Penunjukan Agen Perubahan

Membangun zona integritas di Gede Pangrango membutuhkan komitmen pimpinan hingga seluruh jajaran sebagai unsur pelaksana untuk melakukan perubahan. Peran agen perubahan sangatlah penting sebagai roda penggerak perubahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Agen perubahan diharapkan dapat memberikan keteladanan berperilaku nyata sebagai seorang pemimpin dan sebagai individu anggota organisasi. Agen perubahan merupakan aktor utama yang berpengaruh terhadap perubahan pola pikir dan budaya kerja di Gede Pangrango. Oleh karena itu agen perubahan ditunjuk dari unsur struktural yang memiliki kewenangan dan target kinerja berupa proyek perubahan, yaitu proyek perubahan dalam bidang penelitian dan pendidikan konservasi, pengembangan wisata digital, pengembangan wisa-

ta berbasis masyarakat serta penanganan konflik berbasis partisipatif.

Para agen perubahan diharapkan dapat menelurkan inovasi-inovasi yang dapat mendukung pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang efektif dan solutif.

Koordinasi, Konsultasi, dan Pendampingan Tim
Langkah awal yang dilakukan Gede Pangrango dalam mempersiapkan diri menjadi zona integrasi diperkuat dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada instansi pusat untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan sehingga tujuan akan lebih mudah dan lebih cepat tercapai.

Hasil pembelajaran mandiri diintegrasikan dengan masukan dan saran dari hasil koordinasi, konsultasi dan pendampingan diharapkan dapat menghasilkan *output* yang lebih baik dan mendekati kesempurnaan.

Implementasi

Untuk mengetahui pergerakan perubahan yang terjadi dari upaya yang dilakukan, Pimpinan Gede Pangrango melakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi melalui penyebaran kuisioner internal dan eksternal. Hasil penilaian internal maupun eksternal sudah cukup baik, namun demikian upaya sosialisasi dan internalisasi serta penataan dokumentasi masih harus ditingkatkan.

Kegigihan unsur pimpinan dan seluruh jajaran Gede Pangrango di tahun ini semoga dapat mengantarkan Gede Pangrango untuk memperoleh predikat Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi di tahun yang akan datang...

**HASIL
KORUPSI
BUKAN
REZEKI**

**TOLAK GRATIFIKASI
N
K RUPSI**

Cibodas Meryapa Samota

Bersama: Aganto Seno



Meski keduanya terpisah jauh, namun ada kesamaan antara Cibodas dengan Samota. Cibodas ada di Jawa Barat, sedangkan Samota di Nusa Tenggara Barat. Salah satu kesamaannya adalah keduanya telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO. Cibodas sudah dikenal lebih dulu sejak tahun 1977 sebagai Cagar Biosfer Cibodas, satu dari empat Cagar Biosfer pertama di Indonesia. Sedangkan Samota menjadi Cagar Biosfer ke-16 di Indonesia. Samota yang meliputi Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora ditetapkan sebagai Cagar Biosfer Samota tahun 2019 lalu. Adanya tambahan tiga Cagar Biosfer lagi tahun 2020 ini, menjadikan Indonesia saat ini memiliki 19 Cagar Biosfer.

Apaan sih Cagar Biosfer itu? Pasti ada yang mempertanyakan itu. Cagar Biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/ atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Itu definisi menurut UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

LIPI, sebagai *focal point* MAB-UNESCO menyebutkan bahwa Cagar Biosfer adalah situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama program Man and The Biosphere (MAB-UNESCO) untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal.

Sebuah Cagar Biosfer dibagi menjadi tiga zona atau area, yaitu Area Inti (*Core Area*), Area Penyangga (*Buffer Zone*), dan Area Transisi (*Transition Area*). Sebagian besar, mungkin semua Cagar Biosfer di Indonesia memiliki Area Inti berupa kawasan konservasi, dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), sampai Taman Buru (TB). Misalnya, Area Inti Cagar Biosfer Cibodas adalah TN Gunung Gede Pangrango, TWA Telaga Warna, dan CA Telaga Warna. Kondisi ini menjadikan pengelolaan Cagar Biosfer dapat bervariasi dan tidak terlepas dari pengelolaan kawasan konservasi tersebut, bahkan tidak jarang tanpa adanya pengelolaan secara khusus untuk Cagar Biosfer.





Tidak adanya anggaran khusus yang turun dari UNESCO, menjadikan pengelola Cagar Biosfer agar dapat memanfaatkan status internasional tersebut. Pengakuan internasional sering kali membuat suatu tempat menjadi lebih keren. Papan nama, papan informasi, baliho, atau media informasi lain menjadi penting, terlebih di era dimana semua orang berburu postingan seperti sekarang ini.

Tahun 2020 ini, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai bagian dari Cagar Biosfer Cibodas berkesempatan mengunjungi tiga Cagar Biosfer lain di Indonesia. Salah satunya adalah Taman Nasional Tambora, yang merupakan bagian dari Cagar Biosfer Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo, Gunung Tambora). Saat diskusi dan berbagi cerita tentang Cagar Biosfer, telah terlihat dukungan dari Pemkab Dompu, Pemkot Bima, sampai Pemprov NTB. Dukungan tersebut perlu dituangkan dalam SK Forum yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB sebagai sebuah kekuatan koordinasi. Hal ini telah diperoleh Cagar Biosfer Cibodas melalui SK terbarunya yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 522.51/Kep.79-Rek/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas (FKKP CBC).

Dua Cagar Biosfer lain yang juga sempat disapa oleh Cibodas adalah Wakatobi dan Bunaken. Cagar Biosfer Bunaken Tangkoko Minahasa merupakan Cagar Biosfer termuda bersama Karimunjawa Jepara Muria dan Merapi Merbabu Menoreh yang ditetapkan tahun 2020 ini.

*Ayo ke
Cagar Biosfer*



Buat kamu yang pengen tau apa saja Cagar Biosfer di Indonesia,
berikut daftar beserta tahun penetapannya:

1. Cibodas di Jawa Barat (1977)
2. Lore Lindu di Sulawesi Tengah (1977)
3. Komodo di Nusa Tenggara Timur (1977)
4. Tanjung Puting di Kalimantan Tengah (1977)
5. Siberut di Sumatera Barat (1981)
6. Leuser di Aceh (1981)
7. Giam Siak Kecil Bukit Batu di Riau (2009)
8. Wakatobi di Sulawesi Tenggara (2012)
9. Taka Bonerate Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan (2015)
10. Bromo Tengger Semeru Arjuno di Jawa Timur (2015)
11. Belambangan di Jawa Timur (2016)
12. Berbak Sembilang di Sumatera Selatan (2018)
13. Rinjani Lombok di Nusa Tenggara Barat (2018)
14. Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu di Kalimantan Barat (2018)
15. Togean Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah (2019)
16. Samota (Saleh Moyo-Tambora) di Nusa Tenggara Barat (2019)
17. Bunaken Tangkoko Minahasa, Sulawesi Utara (2020)
18. Karimunjawa Jepara Muria, Jawa Tengah (2020)
19. Merapi Merbabu Menoreh, Jawa Tengah (2020)



Rencana Pemberdayaan Masyarakat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Oleh: Poppy Oktadiyani

Pengelolaan kawasan konservasi secara umum ditujukan untuk menjamin optimalisasi fungsi kawasan sebagai penyangga sistem kehidupan. Keberadaan kawasan tersebut perlu dipertahankan kelestariannya sebagai modal dasar dalam menunjang kesinambungan pembangunan nasional, secara khusus pembangunan di Provinsi Jawa Barat (Taman Nasional Gunung Gede Pangrango/TNGGP, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor). Salah satu tujuan pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan prinsip lestari demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana halnya visi TNGGP, "Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermafaat untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat".

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan kawasan konservasi dengan tetap mempertahankan kelestarian dan fungsi kawasan hutan sering mengalami kendala. Hal ini wajar karena sebagian masyarakat di sekitar kawasan masih menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang terkandung dalam kawasan konservasi. Oleh karena itu dirasa perlu mencari solusi dan memodifikasi sistem pengelolaan hutan pada kawasan konservasi, yaitu dengan model pengelolaan bersama masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Salah satu upaya pemecahan masalahnya adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi mutlak perlu terus diperbaiki dan disempurnakan. Melalui penyusunan Rencana Pember-

dayaan Masyarakat Lingkup Balai Besar TNGGP, diharapkan perbaikan dan penyempurnaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi dapat terwujud, pada gilirannya kelestarian hutan konservasi dapat terlaksana secara optimal.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi bila dilakukan secara optimal dapat memberikan banyak keuntungan ekonomi, social, dan lingkungan dengan dimensi trans-sektoral yang luas. Namun, pada sisi lain, dalam penyelenggaraan pengelolaannya menyimpan sejumlah potensi konflik. Pengembangan dan penyelenggaraan yang tidak terencana dan tertata baik serta kurang mengakomodir berbagai pihak (para stakeholders), sering menimbulkan benturan-benturan kepentingan, yang pada gilirannya akan membawa dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan baik terhadap kawasan maupun masyarakat sekitar kawasan.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga (PMDP) didasarkan atas 3 (tiga) landasan pemikiran, yaitu filosofis, sosiolois, dan yuridis. Secara filosofis, semua sumber daya, termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memiliki multi manfaat yang dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dan umat dapat digunakan sesuai fungsi dan kemampuan sumber daya tersebut. Namun karena sifatnya yang tidak tergantikan pada hal mempunyai peran sangat penting sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan, maka sumber daya tersebut wajib dilindungi dan dilestarikan oleh setiap insan sepanjang generasi.

Secara sosiologis, tidak kurang dari enam juta orang pada saat ini hidup di sekitar kawasan konservasi atau di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi (DPKK) dengan kondisi ekonomi yang umumnya tertinggal atau miskin. Begitu juga halnya untuk DPKK Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) berdasarkan profil desa-desa penyangga TNGGP, jumlah penduduk di 65 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGGP dan 3 desa tidak berbatasan langsung namun adanya ketergantungan terhadap kawasan yaitu sebanyak 428.712 jiwa. Jumlah penduduk yang bertambah akan berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan hidup. Di lain pihak, lemahnya kondisi ekonomi telah memicu peman-

faatan sumber daya tanpa memperdulikan azas-azas konservasi, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan gangguan serius terhadap kelestarian sumber daya dan kawasan hutan. Oleh karenanya, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mereka menjadi kewajiban bersama dan perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian ini tidak hanya kewajiban sektor kehutanan, tetapi juga tanggung jawab sektor dan para pihak lainnya dalam keterpaduan yang direncanakan secara skematis dan sinergis.

Dari segi yuridis, negara mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya, di sisi lain setiap warga negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam upaya konservasi alam serta ikut memelihara dan menjaga kawasan hutan dari perusakan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota harus memberdayakan



masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pada Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 70 Ayat (2) menyatakan, bahwa masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan, serta Pemerintah mendorong peran serta masyarakat tersebut melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Demikian pula Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 37 Ayat (1) menyebutkan, bahwa peran serta rakyat diarahkan dan digerakkan Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan ketiga landasan tersebut, maka dalam upaya pemberdayaan masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi (DPKK) berbasis ekosistem berkelanjutan, yang mendapat dukungan stakehold-

ers, baik melalui pendekatan Desa Konservasi maupun pendekatan lainnya, maka perlu disusun Rencana Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Balai Besar TNGGP dengan tata cara penyusunan berdarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor: P.7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Semoga dengan adanya Rencana Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Balai Besar TNGGP dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi pengelola kawasan konservasi (TNGGP) dalam melaksanakan pembinaan/ pemberdayaan masyarakat desa binaan di daerah penyangga kawasan konservasi TNGGP. Masyarakat sejahtera dan kawasan TNGGP tetap lestari.





Kisah Sukses Pendampingan KTH Hejo Cipruk

Oleh: Febriyani



Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berlokasi di tiga wilayah kabupaten (Cianjur, Sukabumi, dan Bogor) dengan desa penyangga sebanyak 68 desa (65 desa berbatasan langsung dan 3 desa tidak berbatasan langsung, namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan kawasan). Dengan jumlah penyuluhan kehutanan yang bertugas di TNGGP sebanyak 8 orang, tentu jumlah ini sangat terbatas untuk dapat mendampingi dan membina 58 desa. Namun Penyuluhan Kehutanan bekerjasama dengan fungsional lainnya (Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan) dalam melaksanakan pendampingan desa penyangga secara prioritas desa.

Saat ini ada dua orang Penyuluhan Kehutanan yang ditugaskan di Wilayah Bidang PTN 1 Cianjur yaitu satu orang di wilayah Seksi I Cibodas dan satu orang lagi bertugas di Seksi II Gedeh. Wilayah Bidang PTN Wilayah 1 Cianjur merupakan wilayah TNGGP yang berada di Kabupaten Cianjur dengan 5 (lima) Resort, yaitu Resort PTN Cibodas, Resort PTN Mandalawangi, Resort PTN Gunung Putri, Resort PTN Tegallega, dan Resort PTN Sarongge.

Mulai tahun 2015 Penyuluhan Kehutanan bersama fungsional lainnya mulai menyusun kegiatan penyuluhan kehutanan di wilayah kerja. Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan perencanaan penyuluhan, kami awali dengan melakukan kegiatan identifikasi potensi wilayah sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja kami kedepannya. Dari kegiatan perencanaan penyuluhan tersebut, kami memperoleh data jumlah desa penyangga yang ada di kawasan TNGGP sebanyak 68 desa (65 desa berbatasan langsung dan 3 desa tidak berbatasan langsung). Khusus untuk wilayah Bidang PTN 1 Cianjur, sebanyak 18 (delapan belas) desa yang berbatasan langsung dengan kawasan dan merupakan desa penyangga kawasan. Selain itu, kami juga dapat mengetahui tingkat prioritas desa penyangga yang ada di kawasan TNGGP.

Pada tahun 2016 Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan menetapkan Surat Keputusan (SK) terkait lokasi desa binaan dan pendamping pada daerah penyangga kawasan konservasi.

Untuk TNGGP sendiri ditetapkan Desa Gekbrong, dengan saya (Febriyani) sebagai pendampingnya dan Desa Cihanyawar, Arie Januar sebagai pendampingnya. Adanya SK tersebut saya merasa tanggung jawab untuk melakukan penyuluhan di wilayah Gekbrong harus lebih difokuskan dan diprioritaskan. Karena memang dengan 18 (delapan belas) desa di wilayah kerja saya dan petugas lapan-gan/ resort yang terbatas tidak mudah rasanya untuk melakukan pendampingan di semua desa tersebut dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan hasil identifikasi desa penyangga (2016) dan atas arahan pimpinan dan masukan dari resort wilayah memprioritaskan 2 (dua) desa (Desa Gekbrong dan Desa Cimacan) untuk pendampingan intensif selama 5 (lima) tahun. Untuk desa lainnya juga kami tetap melakukan kegiatan pendampingan, tapi tidak seintensif dua desa tersebut. pada tahun 2016 Penyuluhan Kehutanan bersama petugas resort setempat melakukan kegiatan pembentukan kelompok di Desa Gekbrong dan Desa Cimacan.

Berdasarkan data identifikasi potensi yang kami peroleh, di kedua desa tersebut selain berbatasan langsung dengan kawasan juga terdapat masyarakat ex. penggarap kawasan TNGGP (Ex. Perhutani), sehingga tepat sasaran apabila melakukan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) di kedua desa tersebut. Untuk Desa Gekbrong terdapat kader konservasi yang cukup aktif dan sudah lama menjadi mitra TNGGP. Tepatnya di Kampung Tabrik, Desa Gekbrong pada akhir tahun 2016 dibentuk KTH Hejo Cipruk.

Bersama tim resort yang dikomandoi oleh pak Rudy Rudsyansyah saat itu sebagai Kepala Resort kami mulai intensif melakukan penyuluhan/ pendampingan di Desa Gekbrong (KTH Hejo Cipruk). Dalam melakukan penyuluhan/ pendampingan dari awal pembentukan kelompok kami bersepakat untuk menerapkan Pendidikan Orang Dewasa dalam melakukan pendampingan, yaitu tidak memaksa, tidak mengurui, dan tidak menyulitkan masyarakat. Karena memang seluruh anggota KTH Hejo Cipruk termasuk kategori orang dewasa yang sudah bisa membuat keputusan sendiri dan memiliki pengalaman. Dalam menentukan nama kelompok dan kepengurusan kelompok kami hanya mengarahkan,

dan keputusan akhir berada di kelompok. Agustus 2016, ditetapkanlah KTH Hejo Cipruk dengan Kang Uden Suherlan sebagai ketua kelompok. Setelah terbentuk kelompok, kami mendampinginya dalam penyusunan Rencana Lima Tahun Kelompok (RPL) tahun 2016 s/d 2020. Rencana tersebut akan membantu kelompok dalam melakukan kegiatan kedenpannya.

Kampung Tabrik, Desa Gekbrong merupakan wilayah recharge area PT. Tirta Investama (Aqua-Cianjur), tahun 2016 perusahaan tersebut memperkenalkan dan membantu kelompok dalam pendanaan awal membentuk usaha pertanian ramah lingkungan berupa budidaya paprika. Dimulai dengan enam green house. Budidaya tanaman dengan green house cukup efisien, dari luasan 200 m² hasil produksinya sama dengan 1.000 m² lahan biasa (hampir lima kali lipat). Dengan model pertanian berupa green house waktu kerja pun lebih pendek, hanya satu jam per hari, untuk menyiram saja. Tidak ada penyiraman rumput, tanaman di polybag dan bedengan ditutup plastik agar tidak tumbuh gulma (mengurangi ongkos perawatan). Satu tahun menjalankan usaha budidaya paprika ternyata cukup menjalankan usaha dan membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2017, kami melakukan kegiatan identifikasi tipologi di KTH Hejo Cipruk. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diperoleh data potensi dan permasalahan yang ada di KTH Hejo Cipruk, Kampung Tabrik, Desa Gekbrong, Cianjur. Diketahui potensi utama kelompok adalah pertanian (hortikultura) dan wisata, dengan mata pencaharian utama masyarakat sebagai petani dan buruh tani. Setelah memiliki data identifikasi potensi, situasi, masalah/ kendala, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Seluruh data tersebut diperoleh dari partisipasi seluruh anggota kelompok. Perencanaan penyuluhan yang dibuat harus melibatkan kelompok dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya kami melakukan pendampingan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempersiapkan alternatif ekonomi yang cocok untuk dikembangkan oleh KTH Hejo Cipruk, serta untuk menuju kelompok yang sukses dalam mengelola kelembagaan kelompok, menjaga kelestarian ka-

wasan TNGGP dan membantu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Saat itu, tahun 2017 kami yang dikomandoi Pak Agus Suprayogi sebagai kepala resortnya mencoba untuk meningkatkan intensitas pendampingan di KTH Hejo Cipruk.

Sebagai apresiasi kepada masyarakat Kampung Tabrik yang sudah meninggalkan garapan di kawasan (Ex.Perhutani), pada akhir 2017 kelompok mendapat bantuan modal dalam pengembangan alternatif ekonomi dari TNGGP. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok, disepakati bahwa bantuan alternatif ekonomi yang didapat digunakan untuk pengembangan green house budidaya paprika. Memang jauh dari cukup anggaran yang diberikan untuk membangun sebuah green house paprika. Saya selalu menanyakan ke kelompok apa bisa terlaksana anggaran yang tidak banyak tersebut untuk dipakai membangun green house kelompok, kekurangan biayanya bagaimana....tanya saya ke Kang Uden, selaku ketua kelompok. Namun Kang Uden dan pengurus optimis dan yakin kelompok bisa merealisasikan setiap bantuan modal dari mitra sesuai dengan perencanaan.

Hingga tahun 2018, kami terus rutin melakukan pendampingan di KTH Hejo Cipruk. Kelompok diberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelompok, seperti business plan, budidaya, dan pelatihan lainnya yang dibutuhkan oleh kelompok. Dengan beberapa pelatihan yang diberikan kelompok semakin percaya diri dengan meningkatnya keterampilan kelompok.

Saya selalu menyampaikan ke kelompok untuk menjalin komunikasi dengan baik, setiap ada kendala yang dihadapi segera disampaikan dan didiskusikan bersama anggota. Kejujuran, kesederhanaan, keramahan serta keuletan Kang Uden sebagai ketua kelompok membuat usaha yang dikembangkan oleh kelompok terus berkembang dan banyak mitra yang memberikan kepercayaan kepada kelompok untuk bekerjasama. Dinas Pertanian Cianjur yang telah lama menjadi mitra kelompok, hampir setiap tahun selalu memberikan amanah ke kelompok untuk memberikan bantuan dalam pengembangan usaha kelompok.

Kang udan sebelum menjadi ketua KTH Hejo Cip-

ruk, sebelumnya sudah banyak berperan dalam kelestarian kawasan TNGGP. Selama lebih dari 15 (lima belas) tahun menjadi Kader Konservasi binaan TNGGP, akhirnya pada tahun 2019 kag udan mendapat penghargaan sebagai juara pertama lomba wana lestari kategori Kader Konservasi Alam tingkat Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke 4 (empat) tingkat Kementerian KLHK.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan sinergi antar berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, akan tetapi juga dengan industri/ swasta, perguruan tinggi, dan juga yayasan/ komunitas. Seperti yang telah dilakukan saat ini KTH Hejo Cipruk bersama dengan sejumlah mitra seperti TNGGP, Pusat Penyuluhan Kehutanan, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa, Aqua, YBM BRI, Yayasan Kuntum Indonesia, dan ITTO berkolaborasi mengembangkan pemberdayaan masyarakat di Desa Gekbrong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan TNGGP, sehingga tercipta “Leuweung Hejo Masyarakat Ngejo”.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun menggelar acara peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN), sebuah perhelatan yang secara rutin dilaksanakan dalam rangka kampanye konservasi alam. Dalam setiap peringatan HKAN tersebut, Kementerian KLHK memberikan apresiasi kepada masyarakat atas komitmen, peran dan kontribusinya terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati. Salah satunya apresiasi untuk desa binaan konservasi yang ada di setiap UPT KSDAE. Pada HKAN 2019 dari TNGGP mengusulkan Desa Gekbrong (KTH Hejo Cipruk) sebagai Penerima Apresiasi Desa Binaan, tetapi pada tahun itu belum lolos menjadi pemenang. Akhirnya pada bulan Mei 2020, Direktorat Kawasan Konservasi Kementerian KLHK kembali mengirimkan surat terkait Usulan Penerima Apresiasi Desa Binaan Konservasi pada HKAN 2020 ke seluruh UPT KSDAE. Dari TNGGP mencoba mengusulkan kembali Desa Gekbrong (KTH Hejo Cipruk) sebagai penerima apresiasi desa binaan TNGGP dalam rangka HKAN 2020.

Pada bulan Juni 2020, Direktorat Kawasan Konservasi mengirimkan surat terkait Penilaian Lanjutan Apresiasi Konservasi pada HKAN 2020 Kategori Desa Binaan Konservasi. Kami sebagai pendamping

mencoba mendampingi kelompok mempersiapkan dokumen pendukung untuk penilaian apresiasi pada HKAN tahun 2020, kami semakin percaya diri bahwa KTH Hejo Cipruk sudah layak untuk menerima apresiasi desa binaan. Karena pada tahun 2020 aktivitas di KTH Hejo Cipruk lebih berkembang dan lebih baik dari sebelumnya.

Hingga tahun 2020, selama 4 (empat) tahun terbentuk KTH Hejo Cipruk telah sukses melaksanakan 3 (tiga) Aspek Kelola dalam kelompok, yaitu Kelola Kelembagaan, Kelola Konservasi, dan Kelola Usaha. Dengan terlaksananya 3 (tiga) aspek Kelola tersebut pada tahun 2019 KTH Hejo Cipruk telah ditetapkan sebagai kelas KTH Madya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Peran aktif KTH Hejo Cipruk terhadap kelestarian kawasan TNGGP selama ini sangat tinggi, beberapa kegiatan konservasi yang telah dilakukan oleh KTH Hejo Cipruk diantara membantu pemulihian ekosistem kawasan (penanaman pohon dan penyediaan bibit tanaman), ikut serta dalam mensosialisasikan kelestarian kawasan ke masyarakat luas, membantu dalam menjaga keamanan kawasan (patroli kawasan dan monitoring keanekaragaman hayati). Pengembangan alternatif ekonomi yang dilakukan oleh KTH Hejo Cipruk semakin berkembang dengan bertambahnya jenis usaha yang ada di kelompok antara lain pertanian ramah lingkungan (budidaya paprika, aneka tomat, dan melon), Produk olahan sayuran (manisan sayuran, pudding paprika, dan cake butter nut), wisata agro, serta wisata minat khusus (wisata curug goong, kemah, dan riset). Pengembangan usaha yang dijalankan KTH Hejo Cipruk berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNGGP. Saat ini sebanyak 53 KK yang berdampak langsung dengan adanya kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Kelompok.

Alhasil pada HKAN 2020, KTH Hejo Cipruk berhasil memperoleh apresiasi dari Kementerian KLHK kategori Desa Binaan Konservasi. Semoga dengan pemberian apresiasi dalam rangka HKAN 2020 ini menjadi semangat bagi kelompok, serta semakin luas masyarakat yang berperan aktif dalam kelestarian kawasan dan memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan usaha kelompok.



Dari PETANI PENGGARAP Menjadi PELAKU JASA WISATA

Ditulis: Mohamad Arif Junaedi

Proses Pendampingan

Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Putri salah satu resort pemangku kawasan di TNGGP, berbagai permasalahan klasik dalam kawasan konservasi khususnya di Pulau Jawa adalah masih banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan dan menimbulkan tekanan terhadap kelestarian kawasan hutan yang ada, mulai dari perburuan liar, illegal logging, penggarapan lahan tanpa ijin, dan illegal pendakian.

Sebagai pemangku kawasan di tingkat tapak dan ujung tombak pengelolaan kawasan TNGGP, RPTN Gunung Putri telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tekanan terhadap kawasan hutan di wilayah kerja Resort PTN Gunung Putri. Mulai dari pendekatan secara personal kepada masyarakat door to door, penyuluhan melalui pertemuan-pertemuan kelompok tani atau kelompok masyarakat sampai dengan upaya represif yaitu melakukan operasi penurunan penggarap dan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan penggarapan tanpa ijin dan tindak pidana kehutanan lainnya.

Belajar dari pengalaman di lapangan, kami berkesimpulan bahwa terlepas dari pro dan kontra terhadap tindakan yang dilakukan pada oknum masyarakat penggarap tetapi pada akhirnya tindakan represif hanya akan menimbulkan luka dan dendam di masyarakat, ada gap yang lebar antara petugas dan masyarakat. Hal yang terasa sekali adalah ketika pada awal-awal kami bertugas di Resort PTN Gunung Putri, setiap petugas yang datang ke lokasi garapan maka masyarakat lari ketakutan. Kami mengistilahkan “hanya bisa bicara dengan pacul”. Belum lagi seringkali ada fitnah dan provokasi masyarakat di kampung untuk membenci dan memusuhi petugas Resort PTN Gunung Putri.

Untuk merubah mindset masyarakat dari petani penggarap, petugas Resort PTN Gunung Putri sedikit demi sedikit melakukan “gerilya” mencoba mempengaruhi para pemuda di kampung Gunung Putri untuk membuka wawasan supaya mulai merubah mata pencahariannya ke bidang jasa wisata. Beberapa metode yang kami lakukan antara lain adalah mencoba mengajak para pemuda untuk futsal bareng sambil diskusi di sela-sela istirahat, mengajak makan-makan bareng “ngaliwet” dengan

hanya bermodal beras, ikan asin, dan sambal serta ikut dalam komunitas memancing yang ada di Kampung Gunung Putri yang secara rutin setiap hari Selasa atau Rabu melakukan aktivitas memancing di Waduk Cirata atau Waduk Jangari, Cianjur. Alhamdulillah pola-pola pendekatan yang kami terapkan cukup berhasil, dari yang semula mereka takut untuk berbicara mengeluarkan uneg-unegnya pada akhirnya mampu bercanda-canda dengan petugas dan ketika sudah merasa dekat dengan petugas satu persatu uneg-uneg dan permasalahan di masyarakat mulai dapat kami tangkap untuk membuat strategi dan program kerja resort.

Mempengaruhi masyarakat untuk keluar dari zona nyaman memang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Permasalahan pertama di masyarakat adalah rasa minder dari masyarakat yang gagap teknologi, dimana selama ini mereka hanya menjadi penonton. Kemudian secara perlahan petugas Gunung Putri mencoba untuk mendampingi dan melakukan transfer ilmu dan teknologi kepada para pemuda yang selama ini hanya sebagai buruh tani dan ojek sayuran untuk menangkap peluang ekonomi di bidang jasa pelayanan pendakian. Dengan memanfaatkan PC dan fasilitas internet yang ada di resort kami mulai mengajari kepada beberapa pemuda tentang bagaimana mengetik, membuat surat sampai mencetak surat, melakukan transaksi online dan SMS banking, sampai kemudian terbentuk Forum Ekowisata di Gunung Putri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sukatani.

Terbentuknya Forum Ekowisata Gunung Putri ini sempat menimbulkan gaduh dan kesalahpahaman terutama para pelaku usaha jasa/ Event Organizer/ EO pendakian yang selama ini bermain dengan leluasa di jasa pendakian di Gunung Putri dan di Cibodas. Para EO ini menganggap forum ini hanya sebuah kedok dan akal-akalan masyarakat di Gunung Putri untuk membuat legal para penyedia jasa wisata pendakian (EO) yang ada di Gunung Putri. Isu persaingan usaha yang tidak sehat terus menyeruak di antara para EO tersebut.

Dengan usaha tak kenal lelah melalui cara anjangan, penyuluhan, pendekatan personal dari hati ke hati, kami mendorong masyarakat untuk membentuk organisasi atau lembaga yang berbadan hukum

yaitu Koperasi. Setelah beberapa proses telah terlewati maka terbentuklah Koperasi Masyarakat Kampung Gunung Putri Desa Sukatani dengan nama Koperasi Suryakencana Mandiri Sejahtera dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor SK.01369/BH/M.KUMKM.2/V/2019 tanggal 30 Maret 2019. Koperasi ini bergerak di bidang usaha jasa wisata alam khususnya pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tidak hanya di Gunung Putri, ternyata di Cibodas juga terbentuk koperasi yang bergerak di bidang yang sama.

Tantangan yang dihadapi

Dalam beberapa konsep teori sosial yang ada, perlu adanya modal sosial untuk mampu menggerakkan dan merubah mindset masyarakat, salah satunya adalah keberadaan tokoh yang disegani dan sebagai panutan bagi masyarakat. Aspek penokohan yang ada di Kampung Gunung Putri lebih kepada ikatan sedarah, dimana garis keturunan yang tertua akan banyak berpengaruh di masyarakat, kemudian disusul oleh penokohan dari aspek keagamaan seperti ajengan dan ustaz. Beberapa tokoh yang berkarakter kuat di kampung Gunung Putri ini sudah banyak yang meninggal dan sampai saat ini belum ada lagi satu sosok yang mampu mempersatukan masyarakat dan berpengaruh kuat di masyarakat, sehingga tantangan pertama yang dihadapi di Gunung Putri adalah usaha untuk mencetak seorang pemimpin (manajer) yang mampu mengkoordinir masyarakat.

Dari proses seleksi alam yang terjadi kemudian kami memunculkan tokoh dari golongan muda, yaitu Jeinal Mutaqin atau lebih dikenal dengan nama “Si Jack” atau “RT Jack”. Berangkat sebagai anggota muda volunteer Gede Pangrango Operation (GPO) kemudian sempat menjadi porter dan guide wisatawan dan pendaki, sosok yang sehari-hari sebagai petani dan menjadi RT di Kampung Gunung Putri, kami menganggap bahwa sosok ini adalah sosok yang mampu berkolaborasi dengan petugas Resort PTN Gunung Putri. Figur ini dianggap bisa menjembatani antara golongan tua dan golongan muda, selain itu mampu mengkoordinir dan menggalang kekuatan muda yang ada di kampung Gunung Putri. Kami melakukan pendampingan untuk mewujudkan wadah bagi pemuda kampung Gunung Putri yang berkeinginan berkecimpung di dunia usaha khususnya jasa wisata pendakian.

“Godaan untuk tergelincir pada belokan dan tanjakan” Perputaran uang besar dalam bisnis jasa wisata pendakian adalah godaan yang sangat menggiurkan bagi setiap orang, tetapi kemudahan mendapat uang ini juga dapat menjadi bumerang bagi masyarakat yang ikut terjun dalam bisnis ini sehingga tidak jarang adanya praktik kecurangan, berebut pendaki dan banyak EO yang hanya memungut uang dari pendaki tetapi tidak melakukan pembayaran untuk negara (PNBP) dan tidak bertanggungjawab bila ada tamu pendakinya yang mengalami kecelakaan di jalur pendakian dan harus dievakuasi.

“Covid 19 membuyarkan mimpi indah yang sedang dirajut ” Pengaruh Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaku jasa wisata khususnya pendakian di Gunung Putri. Kegiatan pendakian Gunung Gede Pangrango sempat dilakukan penutupan karena kondisi pandemi Covid – 19, sehingga banyak para EO yang tergoda untuk secara diam-diam membawa pendaki illegal naik Gunung Gede mencari celah kelengahan penjagaan petugas di pintu pendakian. Namun, kami di lapangan tetap siaga berjaga selama penutupan pendakian.

Peluang

“Leuweung hejo masyarakat ngejo” dalam bahasa Sunda yang artinya hutan lestari masyarakat sejahtera. Pengembangan sektor wisata diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat sekitar maka petani penggarap di dalam kawasan dapat diturunkan, tekanan terhadap kawasan akan berkurang dan proses pemulihan fungsi kawasan hutan akan berjalan dengan baik.

Bagi para pendaki, Gunung Putri adalah jalur pendakian favorit bagi para pendaki seputaran Jabodetabek, hal ini dikarenakan jalur Gunung Putri adalah jalur terpendek menuju Puncak Gede. Selain fenomena padang rumput “savana” di Alun-Alun Suryakencana dan hamparan bunga abadi “edelweis” yang banyak tumbuh di seputaran savana dengan ditambah suasana magis cerita-cerita supranatural yang berkembang menjadi legenda menjadikan Alun-Alun Suryakencana yang selalu diselimuti kabut menawarkan pengalaman yang sulit terlupakan dan banyak menarik minat para pendaki. Tingginya minat pendaki di jalur Gunung Putri ini turut membias masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam hiruk pi-

kuk menangkap peluang rejeki dari para pendaki, sehingga saat ini banyak bermunculan homestay dan bangunan-bangunan baru yang difungsikan sebagai basecamp, warung makan, jasa penyewaan alat pendakian, souvenir maupun sekedar tempat parkir. Hal tersebut sebagai multiplier effect dari kegiatan pendakian di Gunung Gede Pangrango khususnya pintu masuk pendakian Gunung Putri.

Selain potensi wisata dari kegiatan pendakian, sebetulnya potensi wisata di wilayah kerja Resort PTN Gunung Putri ini masih cukup banyak seperti potensi air terjun, foto selfie, dan forest healing, tetapi sampai saat ini belum banyak tergali dan belum ada investor yang masuk karena belum adanya akses jalan yang memadai menuju lokasi wisata di Gunung Putri.

Pengalaman yang Tak Terlupakan

Pengalaman ini terjadi pada saat kegiatan operasi bersih jalur pendakian Gunung Putri bersama masyarakat, volunteer dan Koperasi Suryakencana Gunung Putri pada Bulan Desember 2019. Beberapa persiapan dan rapat telah kami lakukan bersama pihak-pihak yang terlibat yaitu volunteer GPO, perwakilan masyarakat, koperasi serta partisipan yang rutin selalu ikut dengan kami dalam kegiatan Operasi Bersih Gunung di Gunung Putri. Pada rapat terakhir persiapan peralatan dan logistik, kami telah melakukan checking jumlah peserta dan kebutuhan logistik termasuk peralatan, tenda, sleeping bag, dan lain-lain.

Ketua Koperasi dan rekan-rekan volunteer mengatakan bahwa semua peralatan dan logistik telah siap, pokoknya petugas Resort Gunung Putri tinggal berangkat naik gunung, kemudian nanti di atas sudah disiapin tenda, matras, sleeping bag, dan makanan “tinggal duduk manis” begitu penjelasan dari Ketua Koperasi dan ketua volunteer GPO. Pada hari H setelah upacara seremoni pelepasan pendaki oleh kepala bidang yang diwakili oleh Kepala Seksi PTN Wilayah I Cibodas, akhirnya kami pun berangkat, berjalan paling belakang untuk melakukan sweeping.

Berangkat dari pos jaga Resort PTN Gunung Putri kami melakukan perjalanan dengan santai sambil sekali-kali bercanda. Singkat cerita sekira jam 4 sore kami sampai di lokasi camping di Alun-alun

Barat Suryakencana, kami berusaha mencari tenda yang disediakan oleh panitia. Kemudian ada personil koperasi yang menunjukkan tenda kosong untuk kami menginap. Ketika menanyakan matras dan sleeping bag kepada Ketua Koperasi, mereka mengatakan bahwa jatah sleeping bag dan matras sebagian nggak kebawa ada mist sehingga ketinggalan di camp, tadi ada 2 (dua) set tapi karena kami lama nggak datang sehingga ada yang menggunakannya. “Kebayang kedinginan semalam di Alun-alun Suryakencana” semalam kami tidak bisa tidur karena kedinginan, Akhirnya kami membuat api unggun dan ngobrol bercanda-canda dengan masyarakat sampai pagi. Pengalaman yang tidak terlupakan “Jangan mengandalkan orang lain kalau tidak ingin sengsara pada akhirnya”.



“EKSPEDISI CURUG AUL”

Keindahan Tersembunyi di Pedalaman Pasir Hantap

Oleh: Agung Pakerti

Curug atau air terjun yang berada di pedalaman hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terletak di Wilayah Resort PTN Pasir Hantap ini memiliki keindahan yang alami dihiasi bebatuan berupa dinding tinggi yang memanjang mengelilingi aliran sungai Curug Aul, dimana curug ini berada pada ketinggian 650 mdpl. Mitosnya aul (hobbit) adalah legenda makhluk mirip serigala yang besarnya seukuran manusia dewasa, yang sesekali bisa berjalan tegak seperti manusia. Menurut kepercayaan suku Sunda sendiri, dahulunya aul adalah seorang manusia biasa yang memiliki kesaktian. Jika ada salah satu anggota tubuhnya yang terlepas maka ia bisa dengan mudah menyatukannya kembali.

Tim ekspedisi terdiri dari personil Resort Pasir Hantap dan 3 anggota KTH Harapan Maju (Agung, Robi, Rahmat, Budi, Agus, dan Rahman) bermaksud untuk melakukan identifikasi potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang dipimpin Rahmat sebagai TPHL anggota Resort PTN Pasir Hantap.

Di awal perjalanan tim ekspedisi menaiki 5 motor, kami melewati jalur patroli menuju Kiara Ngolong sampai zona rimba kemudian tim melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju Curug Aul. Dalam perjalanan memasuki sungai menuju air terjun atau Curug Aul, sekitar 1 km dari tempat penyimpanan



motor, ada hal lain yang mencengangkan yaitu tim melewati tebing tebing curam batu yang meneteskan air seperti air hujan, keindahan seperti ini laksana memasuki sebuah dunia lain di film-film petualangan pencarian harta karun. Tebing setinggi lebih dari 25 meter memanjang sepanjang sungai ini menawarkan eksotisnya alam pegunungan yang misterius seperti hutan yang ada di film Avatar ataupun di hutan Amazon. Ketika menuruni tebing curam berbatu ini Robi sempat tergelincir saat menginjak tumpuan batu sehingga menimbulkan kepanikan yang cukup menggetarkan, namun tekad untuk melihat keindahan Curug Aul menguatkan mental kita meneruskan perjalanan ini. Setiba di jalur sungai tim disuguh-

kan keindahan alam yang alami dimana jalur sungai tersebut di bawah tebing curam yang dihiasi akar-akar yang bergelantungan serta tetesan tetesan air yang mengguyur jalan setapak.

Akhirnya tim sampai di lokasi dan lelah pun tergantikan dengan menyaksikan keindahan Curug Aul, lagi-lagi tim dibuat terkejut dengan adanya gua yang berada di belakang curugnya, mitosnya merupakan tempat petapaan manusia sakti yang disebut aul tersebut, Saya sebagai Kepala Resort PTN Pasir Hantap, memiliki ekspektasi tinggi bahwa kawasan Curug Aul akan memiliki nilai jual wisata bagi masyarakat sekitar apabila dikelola dengan baik dan adanya dukungan investor bermodal besar.

*Ayo ke Taman Nasional
Gunung Gede Pangrango*

*Jelajahi Curug Aul
dan
Nikmati Keindahannya*



Seriakan Pesona Alam yang Belum Tersentuh
“DI RESORT PTN GOALPARA”

Oleh: Agus Deni

Dialiran Sungai Cimuncang

Dikeindahan lereng Gunung Gede, di pinggiran hamparan kebun teh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Goalpara, mengalirlah sungai Cimuncang. Air sungai yang bening mengalir di kawasan hutan menuju perkebunan teh, namun sekitar satu Km sebelum sampai diperkebunan teh menemui tebing curam dengan tinggi sekitar 30 meter, sehingga mau tak mau mereka harus terjun ke dasar tebing. “Atraksi para penerjun” ini menyuguhkan pemandangan yang indah di kompleks yang dikenal sebagai air tejun Andamas. Air Terjun Andamas bertetangga dengan Curug Tangga setinggi 15 meter di aliran sungai Cisarua.

“The Heart Land of West Java”, mengingatkan pada manfaat, fungsi, potensi, dan posisi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang sangat penting bagi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat, termasuk daerah DKI Jakarta. “Pesona Alam di Jantung Jawa Barat”, juga mengingat kita pada kekayaan dan keindahan objek wisata alamnya yang menganggumkan. Dari dua sebutan itu saja, orang akan ma’lum bila masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menaruh berminat untuk berkiprah di dunia kerpariwisataan. Demikian juga dengan masyarakat di sekitar Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Goalpara, yang menilai potensi wisata alam di daerahnya cukup tinggi, mereka mengharapkan agar potensi yang ada bisa dikemas dan dikembangkan menjadi desatinasi wisata.

Sebagai gambaran posisi kedua air tejun tersebut, kita berangkat dari Jakarta lewat Sukabumi, sekitar 5 km dari kota Sukabumi arah Cianjur (tempatnya di kampung Cibeureum) akan sampai di persimpangan jalan ke Perkebunan Teh Goalpara. Menyusuri jalan Goalpara dengan situasi khas perkampungan sejauh 8 km, kita akan sampai di perkebunan teh. Dari sini, Pondok Kerja Resort PTN Goalpara tinggal 0,5 km lagi.

Sekitar lima kilometer dari Pondok Kerja ke arah selatan, kita bisa jalan-jalan di tengah-tengah keindahan hamparan kebun teh menuju Air Terjun Andamas. Sedangkan dua kilometer ke arah Timur, program “walking tea” kita akan mengarah ke Curug Tangga.

Cros Country atau Tea Walk

Dengan dikembangkannya destinasi wisata Goalpara, muncul peluang kegiatan Cros country Goalpara – Selabintana, Goalpara – Gedeh atau Goalpara – Sarongge, yang cukup menarik. Hal ini karena antara kawasan perkebunan teh PT Perkebunan Nusantara Gedeh, Goalpara dan PT. Perkebunan Nusantara Perbawati bersambungan.

Sementara, Amas (mantan Kepala Resort PTN Goalpara), berpendapat bahwa selain “tea walk”, dalam wisata agro ini wisatawan bisa mempelajari proses pengolahan teh di pabrik teh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Goalpara sambil menikmati harumnya teh asli Goalpara.

Menurut Eman, masyarakat kampung Bunisari, Perkebunan pernah merencanakan pengembangan wisata agro untuk diversifikasi usaha. Bahkan ada yang mengatakan pada tahun 2005, Bupati Sukabumi telah mencanangkan wisata agro di kebun teh Goalpara.

Beberapa Peluang

Objek wisata berupa air terjun, hamparan kebun teh dan keindahan alam lainnya, bisa diperkaya dengan budaya dan aktifitas masyarakat setempat. Potensi wisata yang dipasarkan selain pemandangan yang indah (termasuk di dalamnya kebun teh dan hutan hujan tropis pegunungan), juga udara yang sejuk dan segar, bumi perkemahan, kehidupan tradisional masyarakat, termasuk pengolahan limbah sapi menjadi biogas dan produksi pupuk organik. Masyarakat sudah siap mendukung pengembangan pariwisata di daerahnya. Menurut mereka usaha atau mata pencaharian semakin susah didapat, mudah-mudahan dengan pengembangan wisata bisa menambah pendapatan.

Amas mencontohkan kelompok “Alam Lestari”, salah satu kelompok Sentra Penyuluh Kehutanan yang didirikan di Desa Sukamaju (desa penyangga Resort PTN Goalpara) pada tahun 2005, pernah berhasil memproduksi dan memasarkan pupuk organik dari limbah peternakan, namun lama-kelamaan usahanya kalah oleh pupuk-pupuk anorganik yang diproduksi dan dijual para pengusaha besar.

Contoh lain, pada tahun 2011, masyarakat Desa Langensari binaan Resort PTN Goalpara telah berhasil memproduksi dan memasarkan biogas dengan memanfaatkan kotoran sapi perah. Pada tahun pertama dan tahun kedua produksi biogas naik pesat dan respon pasar pun cukup tinggi, karena harga biogas yang diproduksi masyarakat lebih murah ketimbang gas LPG. Namun perkembangan selanjutnya, karena harga susu jatuh, petani kecil kalah bersaing sehingga usaha sapi perah bangkrut, buntutnya produsen biogas kehilangan bahan baku.

Program bantuan sapi perah dan biogas tersebut atas merupakan paket bantuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat atas kerjasama Balai Besar TNGGP dan Program Man and Biosfeer Reserve. Paket bantuan berupa, bantuan ternak sapi, pelatihan

produksi biogas dan peralatannya. Hanya sayangnya paketnya tidak termasuk pendampingan masyarakat sampai mereka mapan (mampu bersaing).

Harapan personil Resort PTN Goalpara semakin tinggi untuk bisa mengembangkan destinasi wisata di kawasan Taman Nasional dan mengintegrasikannya dengan kegiatan wisata alam di sekitarnya termasuk dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu dikondisikan antara lain melalui pelatihan untuk menyusun dan mengorganisir paket wisata, pemanduan, penerimaan tamu, memasak, dan lain-lain sesuai dengan keperluan wisatawan. Meningkatnya harapan ini dipicu juga dengan akses ke pasar yang lebih mudah sehubungan dengan dibuatnya jalan tol Bocimi (Bogor Ciawi Sukabumi).

Dalam pembuatan paket wisata, diusahakan sebanyak mungkin masyarakat bisa terlibat, beberapa warga menyiapkan kamar di rumahnya untuk tempat menginap tamu, warga lainnya disiapkan sebagai penyuplai makanan, ada juga yang disiapkan sebagai pemandu wisata.

Mudah-mudahan cita-cita Resort PTN Goalpara ini segera terwujud. Sehingga diharapkan masyarakat akan semakin sejahtera dan kawasan hutan terpelihara.

Sirip Penyu/ Ramo Kuya

Oleh: Ai Nani Rohaeni

©Randi

Nama Lokal : Sirip Penyu/ Ramo Kuya Besar & Kecil
Ilmiah/Latin : Elastotema strigusum (Hassk) & Elastotema strigo gusum (Bl)
Family : Urticaceae

Manfaatnya:
1. Obat panas dalam
2. Obat sariawan
3. Obat sembelit
4. Obat disentri (Buang Air Besar berdarah)

Sirip Penyu atau Ramo Kuya ini, merupakan tumbuhan perdu berbatang hijau muda agak keputihan, tinggi 5 - 40 Cm, berdaun halus mengkilap lebar 2 - 3 Cm bergerigi dan panjang daun 5 cm. (bentuk daun mirip dengan sirip penyu atau kuya). Punya batang mudah putus gampang dipotong dan halus.

Habitatnya di kawasan TNGGP hidup di tanah serasah, pinggir-pinggir kali, dari zona pemanfaatan 600 – 2.400 m dpl, tumbuh juga di area Air Terjun Cibeureum, banyak dan berkelompok.



Canar Bokor/ Canar Besar

Oleh: Ai Nani Rohaeni

© Randi

Nama Lokal : Canar Bokor/ Canar Besar
Ilmiah/Latin : *Smilax makrocarpa* Blume (Bl.)
Family : Smilacaceae

Canar Bokor atau Canar Besar, sebagai tumbuhan liana, tetapi hidupnya nempel di pohon lain, tetapi tidak mencekik pohon hanya sebagai efisit saja, canar bokor adalah golongan buah yang bentuknya agak besar + di atas kelereng. Habitatnya di kawasan TNGGP Sub Montana – Montana, dapat hidup pada ketinggian, 1.000 – 2.400 m dp (di area Air Terjun Cibeureum)

Manfaatnya:

1. Obat penyubur bagi yang belum punya keturunan
2. Obat tekanan darah tinggi/ hipertensi
3. Obat kolesterol



Tongkat/ Tongkat Leutik

Oleh: Ai Nani Rohaeni

©Randi

Nama Lokal : Tongkat/ Tongkat Leutik
Ilmiah/Latin : Zingiber Odoriferum Bl.
Family : Zingiberaceae

Penyebarannya:

Tongtak atau Tongkat Leutik ini, merupakan perdu berimpang ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada tipe hutan Sub Montana – Montana, ketinggian 1.000 – 1.500 m dpl.

Tumbuhan herba, tinggi 1 – 2 meter, daun tunggal, bentuk daun lonjong melanset. Permukaan daun bagian bawah sedikit berbulu. Bunganya berwarna putih kekuningan keluar dari umbi dan panjang tangkainya 0,5-1 meter. Bunga memiliki kelompok warna merah atau coklat kehijauan, bentuknya menyerupai sisik trenggiling.

Manfaatnya:

1. Makanan tupai dan serangga
2. Obat stamina bagi kaum laki-laki
3. Obat encok/ pegal Linu
4. Obat sesak nafas/ asma
5. Obat masuk angin
6. Obat gatal-gatal/ alergi kulit
7. Obat batuk
8. Obat serak pita suara
- 9.

Dampak Pendaki Ilegal

Oleh: Randi



Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan salah satu lokasi pendakian yang cukup dikenal di Indonesia. Hal ini terbukti dengan tingginya minat pengunjung untuk melakukan pendakian di kawasan TNGGP. Aksesibilitas menuju kawasan yang relatif mudah dan jalur pendakian yang cukup memadai, menyebabkan pendakian ke Puncak Gunung Gede dan Pangrango sangat populer di kalangan pendaki pemula, pelajar, mahasiswa, dan kelompok pecinta alam dari kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Tanggerang, dan kota-kota lain.

Karakteristik pendaki di TNGGP umumnya adalah pelajar baik SMA dan SMP maupun mahasiswa. Rendahnya pengetahuan serta kesadaran pengunjung tentang bagaimana berperilaku yang baik dan selaras ketika berada di kawasan konservasi tidak dapat dipungkiri merupakan penyebab terjadinya dampak negatif dari kegiatan pendakian di kawasan TNGGP.

Aktifitas pendakian di TNGGP secara resmi hanya bisa dilakukan di jalur pendakian Cibodas, Gunung Putri, dan Selabintana dengan cara booking online dan di akses pada website <https://www.gedepangrango.org/booking/>. Apabila pengunjung melakukan pendakian di luar jalur resmi maka pihak Balai Besar TNGGP akan melakukan tindakan berupa denda sebanyak 5 (lima) kali lipat per orang menggunakan tiket pendakian sebesar Rp. 34.000 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK.129/BBTNGGP/Tek.2/06/2020 tentang Pemberian Kegiatan Pendakian Terhadap Pendaki tanpa Izin di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain terkena denda kerugian pendaki ilegal lainnya yaitu (1) hilang/ tersesat di dalam kawasan karena tidak mengetahui jalur pendakian; (2) tidak terdaftar di dalam data booking pendakian TNGGP; (3) tidak akan mendapatkan biaya asuransi; (3) apabila terjadi kecelakaan pihak Taman Nasional tidak akan bertanggungjawab; dan (4) pendaki yang membuang sampah dengan sembarangan, kawasan Taman Nasional akan semakin rusak yang disebabkan oleh aktivitas pendakian secara ilegal.

Kegiatan pendakian di alam memiliki resiko. Resiko dapat bervariasi mulai dari kecelakaan ringan hingga kecelakaan berat yang dapat mengakibatkan ke-



matian. Resiko kecelakaan pendaki menjadi semakin tinggi karena pengunjung kurang memahami dan tidak mematuhi peraturan dan cara berprilaku yang tidak memadai, persiapan yang tidak matang, serta tidak mengikuti jalur setapak yang sudah disediakan pihak Taman Nasional.

Di era moderenisasi ini perkembangan teknologi dan media sosial sangat pesat yang mengakibatkan tingginya minat pengunjung untuk aktivitas pendakian, berdasarkan data dari tim evakuasi kecelakaan, di pintu masuk pendakian Gunung Putri dan Cibodas bahwa pengunjung yang melakukan pendakian rata-rata tidak memperhatikan keselamatan bagi dirinya sendiri serta tidak tahu tentang etika perilaku yang baik selama di alam bebas. Karena pengunjung tersebut hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan gambar dan momen yang indah di puncak gunung untuk diunggah di media sosial miliknya.

Maka jadilah “Pendaki Cerdas” yang peduli diri, peduli kawan, dan peduli terhadap lingkungan.

Ayo ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Jelajahi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui Jejaring Sosial



Taman Nasional
Gunung GEDEPANGRANGO
gedepangrango.org